

PROSPEK PENGEMBANGAN TERNAK SAPI DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

AKHMAD RIFAI LUBIS

Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5, Medan

(Makalah diterima 24 Februari 2010 – Revisi 4 Juni 2010)

ABSTRAK

Kekurangan pasokan daging sapi untuk memenuhi kebutuhan nasional terjadi pula secara lokal di Provinsi Sumatera Utara. Kecenderungan peningkatan kebutuhan akan daging sapi di daerah ini dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk, peningkatan ekonomi dan peningkatan keinginan untuk mendapatkan asupan gizi yang lebih baik. Tingkat konsumsi daging sapi rata-rata meningkat 17% dari tahun 2004 – 2008, sehingga dalam kurun waktu tersebut angka pemasukan sapi ke Provinsi Sumatera Utara juga terus meningkat. Upaya pengembangan sapi potong dalam rangka melaksanakan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) di Sumatera Utara telah dilakukan melalui pendekatan teknis maupun kebijakan. Beberapa program pengembangan telah dikembangkan untuk mempercepat produktivitas dan populasi di Sumatera Utara antara lain 1) Program Pengembangan Agribisnis; 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; dan 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; yang semuanya dibiayai baik dari anggaran daerah maupun pusat. Aspek kelembagaan yang telah berkembang untuk mendukung PSDS 2014 adalah Balai Inseminasi Buatan Daerah untuk melayani kebutuhan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2008 disebarkan sebanyak 44.000 dosis semen beku untuk memenuhi permintaan 11 Kabupaten/Kota. Besarnya potensi sumberdaya lahan untuk pengembangan sapi potong diindikasikan oleh tersedianya lahan padang penggembalaan seluas 1.311.159 ha dan lahan perkebunan kelapa sawit maupun karet seluas 1.192.172 ha dalam pola integrasi tanaman dan ternak (SITT). Diperkirakan produksi biomassa jerami padi, jerami kacang dan jerami tebu masing-masing mencapai 7.062.227, 68.145 dan 14.664 ton per tahun. Selain itu, tersedia produksi dedak sebanyak 689.478 ton dan limbah industri kelapa sawit sebanyak 4.159.203 ton per tahun. Beberapa tantangan di daerah Sumatera Utara dalam pencapaian PSDS sesuai dengan konteks waktu yang telah ditetapkan antara lain adalah 1) belum seluruhnya pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang utuh mengenai program tersebut; 2) sulitnya melakukan pengendalian pematangan sapi betina produktif; 3) terbatasnya modal dalam upaya melaksanakan penjarangan sapi betina produktif dari upaya pematangan; serta 4) skala kepemilikan ternak sapi yang kecil sehingga memperlambat adopsi inovasi teknologi.

Kata kunci: Sapi, swasembada, Sumatera Utara

ABSTRACT

PROSPECT OF CATTLE DEVELOPMENT TO SUPPORT SELF SUFFICIENCY OF MEAT IN NORTH SUMATERA PROVINCE

Shortage of beef supply to meet national needs is also found locally in North Sumatera Province. The trend for beef in this area was triggered by the increasing of population, economic improvement and desire for better nutrient consumption. Level of beef consumption is increased 17% from year 2004 to 2008, so in the same period the number of cattle entered into the North Sumatera Province also increased. Some efforts had been conducted to develop beef cattle program in North Sumatera Self Sufficiency Program in Beef through technical and policy approaches. Several programs have been developed to accelerate the development of productivity and the population in North Sumatra, among others, 1) Agribusiness Development Program, 2) Food Security Improvement Program, 3) Farmer's Welfare Program; which are financed by both central and local budgets. Institutional aspects that have been developed to support the PSDS-2014 is the Regional Artificial Insemination Center to serve the needs of semen for districts and municipalities in the Province of North Sumatera. In the year 2008, it has been distributed as many as 44 000 doses of semen for frozen semen to meet the demands of 11 Districts. The amount of land resources for development indicated the availability of pastural land area of 1,311,159 ha from oil palm and rubber plantation, area of 1,192,172 ha for crops and livestock integration system. It is estimated that biomass production of rice straw, bean straw and sugarcane straw reaches 7,062,227; 68 145 and 14 664 tons per year, respectively. Also available as many as 689,478 tons of rice bran and palm oil industry waste as much as 4,159,203 tons per year. Some challenges in the North Sumatera PSDS programs in accordance with a predetermined time include: 1) Not all of the stakeholders get a complete information about the program, 2) the difficulties to prevent productive cows being slaughtered, 3) limited capital in an effort to pick up and redistribute productive cows before slaughtered, 4) small scale ownership of cattle thus slowing the adoption of technological innovations.

Key words: Cattle, self-sufficiency, North Sumatera

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan penting dalam Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) adalah upaya swasembada daging sapi, yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2014. Swasembada yang dimaksud disini adalah kemampuan penyediaan daging sapi dalam negeri sebesar 90 – 95% dari total kebutuhan daging (DEPTAN, 2007).

Permintaan akan daging (sapi) secara nasional maupun lokal di daerah Sumatera Utara terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya tingkat perekonomian masyarakat dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani serta meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2006, Indonesia baru dapat menyediakan kebutuhan daging sapi dalam negeri sekitar 72% atau 256,8 ribu ton, sehingga kekurangannya sekitar 100 ribu ton harus di impor baik dalam bentuk sapi hidup maupun dalam bentuk daging. Pada tahun 2010 apabila tidak dilakukan upaya terobosan, maka diperkirakan pasokan daging sapi dalam negeri hanya mencapai 62,6% atau 259,2 ribu ton daging. Kondisi ini mengharuskan akan adanya volume impor daging sapi sebesar 37,4% atau apabila disetarakan dengan sapi lokal kekurangan sebanyak 708.900 ekor. Devisa yang akan terkuras untuk mengimpor sapi maupun daging diperkirakan akan mencapai Rp. 23,4 triliun (DEPTAN, 2007). Kondisi ini memicu peningkatan produktivitas sapi untuk mencapai swasembada daging sapi. Rencana produksi, pasokan daging serta impor daging sapi dan sapi bakalan diperkirakan sampai dengan tahun 2010 melalui upaya terobosan P2SDS yang sekarang bernama PSDS yaitu permintaan daging 414.317 ton, penyediaan daging dalam negeri 373.705 ton, terdapat kekurangan antara permintaan dengan penyediaan yaitu minus 40.612 ton (-9,8%) atau setara dengan sapi lokal sejumlah 287.828 ekor, sehingga harus impor sapi bakalan 98.329 ekor dan impor daging sebanyak 14.181 ton (DEPTAN, 2007). Untuk memenuhi permintaan daging perlu diupayakan penyediaan dan pemberian pakan yang memadai agar produktivitas sapi potong dapat ditingkatkan. Sapi potong dapat mengubah pakan berserat menjadi sumber pangan yang berkualitas (MATHIUS, 2008).

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kawasan industri penting di Indonesia. Perkembangan berbagai industri penting di wilayah ini, seperti peternakan, pertanian dan perkebunan (terutama kelapa sawit dan karet) menyebabkan peningkatan secara nyata pendapatan domestik regional. Peningkatan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat setempat, terutama kaitannya dengan meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan asal ternak seperti daging, telur dan susu. Sebagai konsekuensinya, penyediaan produk ternak termasuk

daging sapi di wilayah Sumatera Utara dituntut untuk terus meningkat. Menurut YUSDJA *et al.* (2001), yang disitasi oleh WINARSO (2004) mengemukakan bahwa pertumbuhan subsektor peternakan sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena sebagian besar produk yang dihasilkan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Data DISNAK PROV. SUMUT (2008) menunjukkan bahwa pemasukan ternak sapi di Sumatera Utara dari tahun 2004 – 2008 meningkat pesat setiap tahunnya (Tabel 1).

Tabel 1. Data pemasukan ternak sapi ke Provinsi Sumatera Utara

Jenis ternak	Jumlah ternak masuk (ekor)				
	2004	2005	2006	2007	2008
Sapi	5.416	5.000	17.000	25.602	66.300

Sumber: DISNAK PROV. SUMUT (2008)

Dari data pada Tabel 1 terlihat bahwa, dibandingkan dengan angka pemasukan sapi pada tahun 2005, angka pemasukan ternak sapi pada tahun 2006 sangat tinggi (> 300%). Pada tahun 2007 dan 2008 angka pemasukan sapi berturut-turut meningkat lebih dari 150 dan 200% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan pemasukan ini disebabkan oleh adanya permintaan konsumsi daging yang semakin meningkat baik di daerah maupun untuk kebutuhan luar daerah (terutama Provinsi NAD). Menurut laporan dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan NAD kebutuhan pemasukan sapi ke Provinsi tersebut pada tahun 2008 lebih kurang 13.000 ekor (DISKESWANNAK PROV. NAD, 2008).

Konsumsi daging sapi, kambing, domba serta ayam pedaging mengalami peningkatan sebesar 17,82; 3,32; 21,76 serta 1,03% masing-masingnya (Tabel 2). Peningkatan terbesar terjadi pada konsumsi daging domba dan sapi. Tingginya peningkatan konsumsi daging sapi setiap tahunnya dengan sendirinya perlu diikuti dengan upaya peningkatan produksi daging antara lain dengan mendorong berkembangnya usaha peternakan sapi. Terkait hal tersebut di atas PSDS 2014 menjadi sangat relevan. Dengan adanya program ini diharapkan pada tahun 2014 Sumatera Utara tidak mengalami kekurangan sapi dalam memenuhi kebutuhan daging sapi.

Pemotongan sapi betina produktif di Sumatera Utara

Berdasarkan pemantauan Direktorat Jenderal Peternakan, pemotongan ternak khususnya sapi dan kerbau terlihat bahwa 40% dari jumlah ternak yang dipotong adalah ternak betina dan dari jumlah tersebut 25% diantaranya adalah betina produktif. Hal

Tabel 2. Konsumsi daging perkapita berdasarkan komoditas ternak di Sumatera Utara tahun 2004 – 2008

Daging	Tahun (kg/kapita/tahun)					% rata-rata peningkatan/tahun
	2004	2005	2006	2007	2008	
Sapi	0,58	0,81	0,82	0,75	0,99	17,82
Kerbau	0,56	0,56	0,57	0,76	0,42	-6,31
Kuda	0,06	0,01	0,01	0,01	0,00	-23,39
Kambing	0,17	0,23	0,19	0,17	0,19	3,32
Domba	0,06	0,06	0,09	0,09	0,11	21,76
Babi	2,31	2,05	2,20	2,17	1,97	-3,69
Ayam buras	2,15	1,97	1,78	1,43	0,98	-13,66
Ayam petelur	0,69	0,30	0,21	0,38	0,35	-12,30
Ayam pedaging	3,71	3,45	3,17	3,92	3,86	1,03
Itik	0,10	0,08	0,07	0,14	0,07	-6,74

Sumber: DISNAK PROV. SUMUT (2008)

tersebut berarti lebih kurang 10% dari jumlah pemotongan ternak betina adalah betina produktif, sisanya 5% merupakan ternak majir dan 10% sapi tua. Di Sumatera Utara data pemotongan ternak sapi tercatat dan tidak tercatat tahun 2008 adalah sebanyak 69.644 ekor (DISNAK PROV. SUMUT, 2008) dan apabila diasumsikan 10% tingkat pemotongan sapi betina produktif, maka jumlah sapi betina yang dipotong sebesar 6.964 ekor setiap tahun. Akibat dari tingginya jumlah pemotongan betina produktif tersebut dikhawatirkan terjadinya penurunan populasi ternak lokal, akibat terkurasnya betina produktif yang seharusnya masih dapat melahirkan. Apabila kondisi tersebut di atas berlangsung terus maka sudah tentu akan menyebabkan stok sapi potong dalam negeri semakin terkuras sehingga populasi ternak juga berkurang.

Sebenarnya upaya pengendalian pemotongan sapi betina produktif telah dimulai sejak zaman Belanda. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan pelarangan pemotongan sapi betina produktif yang tertuang dalam Staatblad No. 614 Pasal 2 Tahun 1936. Kemudian dipertegas dengan Instruksi Bersama antar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit. Disamping itu, dalam Staatblad tahun 1936 dijelaskan juga bahwa dilarang menyembelih atau menyuruh menyembelih ternak besar sapi dan kerbau betina. Artinya bahwa yang memotong dan yang menyuruh sama-sama dapat sangsi hukum. Alasan dan tujuan larangan tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya penurunan populasi sapi/kerbau, menjamin kelestarian dan meningkatkan produksi.

Berbagai langkah upaya operasional yang dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian swasembada daging nasional tersebut yaitu: 1) memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor; 2) penjarangan dan penyelamatan betina produktif; 3) pengamanan gangguan reproduksi dan kesehatan hewan; 4) perbaikan kawin alam melalui distribusi pejantan unggul dan sertifikasi pejantan pemacek; 5) pengembangan dan pemanfaatan pakan lokal; 6) pengembangan SDM dan kelembagaan; serta 7) penyediaan induk/bibit (DEPTAN, 2007). Untuk Provinsi Sumatera Utara yang diutamakan adalah kombinasi antara kegiatan IB dan penggunaan pejantan unggul serta penyelamatan sapi betina produktif. Langkah operasional utama adalah dengan penyelamatan pemotongan ternak sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) dan penjarangan ternak sapi betina produktif yang di impor oleh perusahaan *feedlotter*. Upaya lain termasuk menjarang atau menyelamatkan sapi betina yang masih produktif dari kegiatan perdagangan di pasar hewan, sapi betina yang akan dikeluarkan dari wilayah setempat. Menyediakan sapi betina produktif bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan budidaya sapi potong merupakan langkah penting untuk meningkatkan jumlah kelahiran. Sementara itu, memperkuat modal usaha kelompok peternak dengan memanfaatkan sapi betina produktif hasil penjarangan sebagai usaha budidaya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan populasi sapi potong. Kegiatan penjarangan ternak sapi betina produktif tersebut dapat dikonsentrasikan pada daerah-daerah yang tingkat pemotongan ternaknya tinggi, populasi ternak tinggi dan impor bakalan tinggi serta sumber pakan masih mampu untuk menampung tambahan ternak tersebut.

Potensi pengembangan peternakan sapi di Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki potensi yang strategis dan memegang peranan penting sebagai pendorong swasembada daging nasional (UMAR, 2009). Pemeliharaan secara ekstensif atau semi-intensif dapat dilakukan dengan memanfaatkan padang penggembalaan seluas 1.311.159 ha dan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet yang mencapai 1.192.172 ha dalam pola integrasi tanaman dan ternak (SITT). Menurut CHANIAGO (2009) yang disitasi oleh ISHAK (2009) melaporkan bahwa keuntungan integrasi sapi dengan kelapa sawit adalah diperolehnya *output* tambahan yaitu lebih banyak produksi TBS dan CPO akibat pupuk organik, penghematan biaya pembuatan kolam limbah pabrik kelapa sawit, penghematan biaya transportasi TBS, penghematan biaya pupuk, penghematan pembuatan dan pemeliharaan jalan, pertumbuhan bobot hidup sapi dengan biaya murah dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya DIWYANTO *et al.* (2004) mengamati bahwa penggunaan sapi Bali sebagai tenaga penarik gerobak ataupun untuk mengangkut TBS di PT Agrinical, Bengkulu telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemanen, penurunan biaya tenaga kerja serta menghasilkan kompos yang sangat diperlukan untuk mengurangi biaya pemupukan. Selain lahan yang relatif luas, potensi pakan berupa limbah dan hasil sisa tanaman tersedia melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Diperkirakan produksi biomasa jerami padi, jerami kacang dan jerami tebu mencapai 7.062.272, 68.145 dan 14.664 ton per tahun masing-masingnya. Selain itu, tersedia produksi dedak sebanyak 689.478 ton dan limbah industri kelapa sawit sebanyak 4.159.203 ton per tahun, yang menurut ELISABETH dan GINTING (2004) produk dan hasil samping pabrik kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selanjutnya UTOMO dan WIDJAYA (2004) menyatakan bahwa limbah kelapa sawit berupa solid berpotensi sebagai sumber nutrisi untuk ternak karena mengandung protein kasar 12,63% dan energi 154 kalori/100 g, ketersediaannya melimpah, berkelanjutan dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Diperkirakan dari potensi tersebut yang dapat dimanfaatkan secara efektif 70% dan baru dimanfaatkan sekitar 30%.

Potensi kelembagaan yang akan mendukung perkembangan usaha budidaya sapi dan kerbau ditunjukkan dengan adanya baik kelembagaan pemerintah maupun swasta. Kelembagaan pemerintah seperti UPT BIBD (Balai Inseminasi Buatan Daerah) Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara berfungsi dalam penyediaan semen beku, sedangkan BPPV Wilayah I Medan berfungsi dalam penyidikan penyakit hewan. Penanganan kesehatan hewan juga didukung

oleh tersedianya sebanyak 10 unit Pos Keswan dan Laboratorium tipe C yang ada di kabupaten/kota, serta Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan di kabupaten/kota dan juga adanya Balai-balai penyuluhan di kabupaten/kota yang berfungsi untuk memberikan penyuluhan kepada peternak, kelembagaan swasta seperti perusahaan pabrik pakan dan obat-obatan ternak serta importir dan distributor sapi juga membantu kelangsungan usaha secara lebih efisien.

Seekor sapi digemukkan dengan memanfaatkan potensi produksi sampingan kelapa sawit, sesuai dengan data hasil penggemukkan sapi PO yang dilakukan oleh Departemen Peternakan Fakultas Pertanian USU tahun 2007 maka pertambahan bobot badan harian adalah 0,785 kg/ekor/hari (FAPERTA USU, 2007). Apabila digemukkan selama 180 hari dengan harga Rp. 30.000/kg bobot hidup maka pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 4.239.000/ekor.

Program pengembangan peternakan sapi di Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Program Kegiatan pada tahun 2009 mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara. Ada beberapa kegiatan yang dananya dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan). Adapun beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah:

1. Program Pengembangan Agribisnis dengan APBD sebesar Rp. 1.932 juta dan APBN sebesar Rp. 3.730 juta.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan APBD sebesar Rp. 14.379 juta dan APBN sebesar Rp. 6.195 juta.
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan APBD sebesar Rp. 550 juta dan APBN sebesar Rp. 250 juta.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi ternak, khususnya sapi dan kerbau.

Strategi pencapaian swasembada daging sapi di Sumatera Utara

Upaya percepatan swasembada daging sapi 2014 ditempuh melalui dua strategi yaitu strategi bersifat teknis dan non-teknis. Strategi teknis meliputi: 1) pengembangan sentra pembibitan dan penggemukkan dengan menggunakan teknologi reproduksi (inseminasi buatan dan kawin alam dengan pejantan unggul) pada daerah pengembangan sapi potong; 2) revitalisasi

kelembagaan dan sumber daya manusia di lapangan dengan mengaktifkan kembali Pos IB, Poskeswan, melengkapi peralatan dan infra struktur yang diperlukan; dan 3) penguatan sarana dan prasarana pendukung berupa lahan padang penggembalaan, pembuatan embung, peralatan pengolahan pakan, sarana satuan pelayanan IB serta sarana lain yang diperlukan. Adapun strategi non-teknis berupa dukungan finansial melalui APBN, APBD, swasta dan masyarakat yang didukung oleh pemerintah pusat dan daerah serta DPR/DPRD, serta pengembangan wilayah yang difokuskan pada daerah sentra sapi potong.

Beberapa kebijakan operasional untuk mengimplementasikan strategi tersebut di atas antara lain adalah: a) pengembangan mutu bibit sapi potong yang ditempuh melalui perbaikan dan penyediaan bibit berkualitas (intensifikasi IB dan kawin alam dengan pejantan terpilih dan transfer embrio); b) mengurangi ketergantungan bakalan dari luar negeri; dan c) pengembangan pakan ternak sapi potong yaitu pendekatan pola intensif untuk daerah padat penduduk (pakan diarahkan pada pemanfaatan limbah pertanian dan limbah industri pangan), sedangkan untuk daerah jarang penduduk dilakukan perbaikan padang penggembalaan (perbaikan kualitas hijauan, pembuatan embung, pembuatan shelter); d) pengendalian penyakit reproduksi dan kesehatan hewan, dengan fokus kepada gangguan reproduksi akibat antara lain penyakit Brucellosis dan Leptospirosis; e) menyediakan permodalan dengan fasilitas kredit lunak (KKPE, BLMKIP, SP3) kepada para peternak dan investor yang akan menanamkan modalnya di bidang penggemukan dan perbibitan sapi potong; f) peningkatan mutu daging sapi potong, dengan melengkapi sarana pendukung Rumah Potong Hewan dalam upaya penyediaan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal); dan g) menjaring betina produktif yang akan dipotong di RPH.

Peran lembaga inseminasi buatan dalam mendukung PSDS di Sumatera Utara

Sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2001 tentang Organisasi, Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, nomor 061/295.K/tahun 2002, tanggal 31 Mei 2002 tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas peternakan serta organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pada dinas peternakan Provinsi Sumatera Utara, maka Balai Inseminasi Buatan Daerah Sumatera Utara (DISNAK PROV. SUMUT, 2008) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang peranannya sangat diharapkan dalam mendukung program swasembada daging sapi di Sumatera Utara terutama dalam hal penyediaan dan pendistribusian semen beku sampai ke petugas inseminator secara tepat, cepat dan berkualitas,

melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan program swasembada daging sapi, melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan di kabupaten/kota pelaksana inseminasi buatan di Provinsi Sumatera Utara.

Pelaksanaan kegiatan Balai Inseminasi Buatan di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam upaya mencapai sasaran dilakukan oleh tenaga pelaksana inseminasi buatan (Tabel 3). Total jumlah inseminator di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 mencapai 139 orang dengan total target dosis tahun 2008 untuk wilayah Sumatera Utara adalah sebesar 44.000 dosis.

Tabel 3. Jumlah tenaga pelaksana inseminasi buatan dan dosis *straw* per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

Kabupaten/kota	Jumlah inseminator	Target dosis
Deli Serdang	21	9.000
Langkat	40	19.500
Asahan	10	3.500
Labuhan Batu	8	2.400
Simalungun	18	*
Binjai	2	1.000
Karo	6	300
Tapanuli Selatan	2	300
Madina	4	300
Medan	2	300
Jumlah	139	44.000

* Pengadaan *straw* sendiri

Sumber: DISNAK PROV. SUMUT (2008)

Tiga kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki jumlah inseminator terbanyak yaitu Kabupaten Langkat (28,8%), Kabupaten Deli Serdang (15,1%) dan Kabupaten Simalungun (12,9%).

Pembentukan Balai Inseminasi Buatan Daerah di Sumatera Utara terutama didasarkan kepada:

- Dukungan atas pencanangan swasembada daging sapi tahun 2014.
- Meningkatnya kebutuhan peternak sapi akan semen baik cair maupun beku.
- Mahalnya penggunaan semen beku bila harus didatangkan dari luar.
- Adanya dukungan pemerintah pusat berupa bantuan ternak sapi jantan unggul.

Dengan demikian adanya Balai Inseminasi Buatan Daerah tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan aktif terhadap keberhasilan PSDS di Sumatera Utara. Balai tersebut akan melaksanakan peran dalam bentuk:

- a. Penyediaan bibit (semen beku/cair) secara tepat dan cepat serta berkualitas.
- b. Penghematan dana untuk pembelian semen beku, sebab akan lebih dekat dengan lokasi kebutuhan (transpor).
- c. Pengurangan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam rangka otonomi daerah.
- d. Mempercepat proses swasembada daging, khususnya daging sapi.
- e. Meningkatkan kemampuan SDM di daerah.
- f. Memperbaiki mutu genetik ternak.
- g. Meningkatkan PAD dari subsektor peternakan
- h. Meningkatkan pendapatan petani-ternak sebab ternak hasil inseminasi buatan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi lokal.

Dalam melaksanakan peranannya Balai Inseminasi Buatan Daerah mengoleksi semen beku dari berbagai bangsa sapi sesuai dengan kondisi *preference* konsumen/peternak (Tabel 4).

Tabel 4. Jenis dan jumlah semen beku sapi koleksi Balai Inseminasi Daerah Sumatera Utara tahun 2008

Jenis semen beku	Jumlah
Simental	22.520
Limousine	11.969
Brahman	3.117
Bali	340
Ongole	85
FH	1.777
Jumlah	39.808

Sumber: DISNAK PROV. SUMUT (2008)

Jenis sapi yang paling diinginkan oleh peternak sapi di Sumatera Utara adalah semen sapi Siemental dan Limousine. Ternak-ternak hasil IB dengan sapi-sapi inilah yang mempunyai harga jual tertinggi.

Tantangan pencapaian swasembada daging sapi

Revitalisasi pertanian, perkebunan dan kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 11 Juni 2005, mengamanatkan bahwa salah satu programnya yaitu swasembada daging sapi harus dapat terealisasi pada tahun 2010. Setelah dilakukan evaluasi maka P2SDS diperpanjang sampai tahun 2014. Untuk mencapai keberhasilannya, program ini dilakukan dengan 2 cara pendekatan yaitu; tanpa upaya percepatan (regular) dan dengan langkah percepatan (menggunakan upaya-upaya terobosan) melalui Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS). Konsep pemerintah dalam mencapai swasembada daging sapi yang dituangkan dalam program PSDS selama ini terkesan sangat terpusat,

sehingga gaungnya kurang terasa di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Disamping itu, keterlibatan sektor lain seperti perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, kehutanan, UKM maupun lembaga legislatif serta pihak swasta/koperasi dan peternak sebagai ujung tombak menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilannya. Hal tersebut terlihat pada asumsi bahwa pembiayaan PSDS yang cukup besar dan diperkirakan mencapai sekitar Rp. 20 triliun dibebankan terutama kepada masyarakat peternakan (sekitar 90%), sedangkan peran pemerintah hanya sebagai pemicu (sekitar 10%).

Upaya membumikan langkah operasional PSDS melalui 7 langkah operasional (7 LOP) (DEPTAN, 2007) yang telah ditetapkan tidak selalu mudah diimplementasikan di lapang. Penjaringan dan Penyelamatan Betina Produktif ini lebih populer disebut sebagai “kebijakan Tunda Potong”, operasionalisasinya adalah dengan melakukan pembelian sapi betina produktif di RPH, di pasar hewan dan di masyarakat. Nyatanya konsep ini tidak didukung dalam bentuk *manual* yang mampu menerjemahkan dari bahasa kebijakan ke dalam bahasa bisnis. Sehingga untuk mengoperasionalkannya tidak mendapat dukungan perbankan maupun para jagal/pemotong, pengusaha *feedlot* dan masyarakat peternak.

Penanganan Gangguan Reproduksi dan Keswan; Langkah operasionalnya yaitu dengan melakukan Pemeriksaan dan penanganan kesuburan akseptor serta penanganan kesehatan pedet. Program ini memerlukan tenaga paramedis yang cukup banyak. Mengingat, peternakan rakyat sapi potong sangat tersebar dengan skala usaha yang kecil (2 – 5) ekor per rumah tangga. Sementara di lapangan keterbatasan tenaga penyuluh dan paramedis menjadi kendala utama.

Kegiatan Optimalisasi Akseptor dan Kelahiran melalui Inseminasi Buatan mencakup upaya peningkatan jumlah akseptor ternak dan peningkatan kelahiran serta pengembangan mutu bibit. Dalam kegiatan ini berbagai asumsi yang digunakan dirasakan sangat sulit untuk dicapai. Penetapan asumsi ini sangat optimis sehingga dikhawatirkan program ini menjadi *over* estimasi. Penyediaan induk/bibit merupakan langkah penyediaan bibit melalui impor, pemanfaatan betina eksimpor dari *feedlotter* sebagai induk dan pengembangan VBC (*Village Breeding Centre*) merupakan kegiatan yang sangat sulit diimplementasikan pada saat ini. Karena hal tersebut belum ditunjang oleh berbagai prasyarat pendukung bagi kegiatan dimaksud, misalnya: 1) pengadaan sapi bibit impor sejumlah tertentu belum didukung sistem administrasi keuangan yang memadai sesuai dengan kebutuhan; 2) sapi betina produktif yang ada pada perusahaan *feedlot*, bukan peruntukan bagi pengembangan bibit, tujuan utamanya bagi ternak

potong, sehingga pola perhitungannya menjadi tidak akurat; 3) VBC yang ada di masyarakat masih belum memiliki standarisasi (SOP) yang diakui lintas sektoral. Sehingga peternak yang tinggal di kawasan VBC tidak mendapatkan insentif apa-apa. Distribusi Pejantan Unggul dengan langkah operasionalnya melakukan penyebaran pejantan unggul di daerah non IB dan melakukan penggantian pejantan secara berkala.

Operasionalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Pakan Lokal yaitu dengan melakukan identifikasi/pemetaan pakan lokal dan optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna. Kegiatan yang harus difokuskan khususnya mengantisipasi kelangkaan pakan sebagai akibat krisis energi dan pemanasan global. Orientasinya difokuskan dengan melakukan pengembangan “bioteknologi” pemanfaatan mikroba dalam penyediaan pakan lokal.

Pengembangan SDM dan Kelembagaan: Operasionalisasinya dengan melakukan; upaya peningkatan kemampuan peternak melaksanakan GFP (*Good Farming Practices*) dan peningkatan manajemen kelompok dan peningkatan kualitas kelompok. Namun, secara teoritis perubahan pola tingkah laku peternak dalam menerima inovasi memerlukan waktu yang cukup panjang, melalui tahapan; *awareness-interest-trial-evaluation-adoption*.

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, tampaknya 7 LOP ini harus dibuatkan dalam bentuk *manual book* yang berkekuatan hukum tetap sehingga mendapatkan dukungan dari para pihak pemangku kepentingan. Hal tersebut sangat diperlukan agar tingkat keberhasilannya dapat dicapai sesuai dengan target (tolok ukur keberhasilan), dan apabila tidak dilaksanakan akan memiliki konsekuensi hukum yang pasti. Secara konkret yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan segera adalah: 1) pemerintah menerbitkan KEPPRES atau INPRES PSDS; 2) melakukan revisi/perbaikan terhadap pedoman operasional konsep PSDS; dan 3) menciptakan iklim yang kondusif agar terjadi sinergitas pemanfaatan dana pusat-daerah serta dana-dana pihak swasta/koperasi maupun CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Jika evaluasinya hanya dilakukan terhadap kegiatan pemerintah yang peranannya cuma 10%, maka tingkat keberhasilan program ini akan sangat disangsikan.

Contoh konkret; landasan hukum program swasembada daging dalam bentuk Permentan P2SDS baru dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2007, dimana waktu berjalan tinggal beberapa tahun lagi. Berbagai penjabaran rencana tindak program ini, ternyata dirasakan belum “membumi” sehingga sangat sulit untuk dilakukan implementasinya di lapangan (di tingkat kabupaten/kota).

Berbagai langkah strategis yang dapat dilakukan dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi Birokrasi dan Politik; Program ini harus memiliki kepastian hukum tetap. Artinya walaupun program ini merupakan “kemauan politik” pemerintah yang di undangkan oleh pernyataan Presiden RI di hadapan publik. Namun jika tidak dioperasionalkan sesuai birokrasi pemerintahan dalam bentuk “kebijakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden”, tentu program ini akan menghadapi berbagai kendala di lapangan, karena ini bersifat lintas sektoral.

Strategi konseptual; Program ini memiliki strategi konsep yang masih memerlukan pemantapan. Hal tersebut didasarkan kepada berbagai data yang digunakan (tingkat keakurasiannya diragukan) dalam menganalisis situasi dan perspektif pengembangan sapi potong. Penyebabnya adalah kelemahan dalam menentukan referensi terhadap data yang digunakan. Oleh karenanya, diperlukan penyesuaian kembali penggunaan data yang digunakan dalam melakukan analisis perpektifnya.

Strategi teknis operasional; Dalam mengimplementasikan berbagai rencana tindak P2SDS yang dibuat, ternyata tidak fokus kepada target dan belum mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten) serta rendahnya keterlibatan swasta/koperasi. Dalam mewujudkannya diperlukan berbagai upaya pendekatan insentif, agar para pihak merasa terlibat dalam program ini.

KESIMPULAN

Wilayah Provinsi Sumatera Utara potensial untuk pengembangan ternak sapi potong, dan pemerintah daerah setempat telah berupaya untuk berperan serta dalam mengembangkan komoditas ini yang sebenarnya amat prospektif. Hasil analisis finansial yang dilakukan di tingkat petani ternak menunjukkan keragaan usaha tani ternak yang layak untuk dikembangkan.

Untuk pengembangan ternak sapi dalam rangka mendukung PSDS di Sumatera Utara maka harus dibuatkan dalam bentuk *manual book* yang berkekuatan hukum tetap sehingga mendapatkan dukungan dari para pihak pemangku kepentingan. Hal tersebut sangat diperlukan agar tingkat keberhasilannya dapat dicapai sesuai dengan target (tolok ukur keberhasilan), dan apabila tidak dilaksanakan akan memiliki konsekuensi hukum yang pasti. Secara konkret yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan segera adalah: 1) pemerintah menerbitkan KEPPRES atau INPRES PSDS; (2) melakukan revisi/perbaikan terhadap pedoman operasional konsep PSDS; dan (3) menciptakan iklim yang kondusif agar

terjadi sinergitas pemanfaatan dana pusat-daerah serta dana-dana pihak swasta/koperasi maupun CSR (*Corporate Social Responsibility*).

DAFTAR PUSTAKA

- CHANIAGO, T. 2009. Perspektif Pengembangan Ternak Sapi di Kawasan Perkebunan Sawit. Makalah dipresentasikan pada acara Workshop Dinamika dan Keragaan Sistem Integrasi Ternak – Tanaman Padi, Sawit, Kakao. Bogor, 10 Agustus 2009. Puslitbang Peternakan, Bogor.
- DEPTAN. 2007. Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS). Departemen Pertanian, Jakarta.
- DISKESWANNAK NAD. 2008. Laporan Tahunan. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- DISNAK PROV. SUMUT. 2008. Statistik Peternakan. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Medan.
- DWIYANTO, K., D. SITOMPUL, I. MANTI, I.W. MATHIUS dan SOENTORO. 2004. Pengkajian Pengembangan Usaha Sistem Integrasi Kelapa Sawit – Sapi. Pros. Lokakarya Nasional Sistem Integrasi Kelapa Sawit – Sapi. Bengkulu, 9 – 10 September 2003. Departemen Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT Agrifinal hlm. 11 – 22.
- ELISABETH, J. dan S.P. GINTING, 2004. Pemanfaatan Hasil Samping Industri Kelapa Sawit sebagai Bahan Pakan Ternak Sapi Potong. Pros. Lokakarya Nasional Sistem Integrasi Kelapa SawitSapi. Bengkulu, 9 – 10 September 2003. Departemen Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT Agrifinal hlm. 110 – 119.
- FAPERTA USU. 2007. Hasil Penelitian Tim Departemen Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara di Kebun Laras PTPN IV Tahun 2007, Medan.
- ISHAK. A. 2009. Sistem Integrasi Ternak dengan Kelapa Sawit (Telaahan Kasus pada Integrasi Ternak dengan Kelapa Sawit). Universitas Bengkulu.
- MATHIUS. I-W. 2008. Pengembangan Sapi Potong Berbasis Industri Kelapa Sawit. Pengembangan Inovasi Pertanian. Puslitbang Peternakan, Bogor. hlm. 206 – 224.
- UTOMO. B.N. dan E. WIJAYA. 2004. Limbah padat pengolahan minyak sawit sebagai sumber energi nutrisi ternak ruminansia. J. Litbang Pertanian. BPTP Kalimantan Tengah. hlm. 22 – 28.
- WINARSO. B. 2004. Prospek Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong di Kalimantan Timur. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Working Paper No. 27. Pebruari 2004.
- YUSDJA, Y., H. MALIAN, B. WINARSO, SAYUTI dan A.S. BAGYO. 2001. Analisis Kebijakan Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan Peternakan. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.